

DINAMIKA ORGANISASI MUHAMMADIYAH DI SUMATERA UTARA

Dja'far Siddik

UIN Sumatera Utara, Indonesia
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan, Sumatera Utara, 20371
e-mail: djafarmedan@gmail.com

Abstract: The Dynamics of Muhammadiyah Organization in North Sumatera. From various Islamic organizations which growing and developing in Indonesia archipelago, it can be said that NU and Muhammadiyah become the two largest Islamic organizations. As an Islamic organization, Muhammadiyah has a huge business charity spread throughout the territory of Indonesia. Unfortunately studies on Muhammadiyah have so far scrutinized this organization at national level, tending to overlook some of its interesting and sometimes peculiar local developments. This article will examine the dynamics of the Muhammadiyah in North Sumatra. The data of this study is obtained from official documents of the organization plus primary works of experts about the movement of this organization nationally and locally. This study proposes that Muhammadiyah has established itself in North Sumatra (then, East Sumatra) since the colonial era, where this organization has received much opposition from the colonists and the existing sultanates. The independence changes the socio-political conditions of North Sumatra, providing Muhammadiyah more freedom to develop its religious understanding and movement, until it became a large organization in the North Sumatra opposing Al Washliyah and Al Ittihadiyah. This study is expected to contribute to the study of Islam in the Indonesia archipelago, and strengthen the reference of Islam and Muhammadiyah outside of Java.

Keywords: Islamic organization, Muhammadiyah, Tapanuli, East Sumatera

Pendahuluan

Tidak bisa dimungkiri bahwa kajian-kajian terkemuka tentang organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia lebih diarahkan kepada organisasi-organisasi yang lahir di Jawa, khususnya NU¹ dan Muhammadiyah. Kajian-kajian organisasi Islam di luar Jawa masih terbengkalai meskipun sudah ada ke arah itu, misalnya penelitian terhadap perkembangan terkini organisasi Al Washliyah dan Al Ittihadiyah yang lahir di Sumatera Utara. Kajian-kajian tentang Muhammadiyah sebagai organisasi yang lahir di pulau Jawa pun lebih banyak dititikberatkan pada gerak juang pimpinan pusat organisasi ini, sehingga peran dan gerakan organisasi ini di luar Jawa tidak banyak diteliti.²

Di luar pulau Jawa, beberapa organisasi Islam telah tumbuh dan berkembang selama masa kolonial Belanda. Sebut saja di Sumatera Utara, muncul organisasi Al Jam'iyatul Washliyah dan al-Ittihadiyah.³ Dua organisasi ini di era 1930-an muncul sebagai organisasi Islam yang banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan umat Islam di Sumatera Utara. Akan tetapi, dua organisasi Islam asal pulau Jawa seperti NU dan Muhammadiyah juga telah hadir sebelum dua organisasi tadi. Organisasi Islam yang juga banyak mendapatkan tantangan dari masyarakat Muslim terutama pihak kerajaan di Sumatera Timur adalah Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah berjuang keras dalam mempertahankan eksistensinya, hingga sampai era terkini organisasi ini telah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Sumatera Utara mengingat amal usahanya hampir meliputi kawasan ini.

Metode Penelitian

Artikel ini akan mengkaji dinamika organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara. Paparan artikel ini merupakan rangkuman dari hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap organisasi

Muhammadiyah di luar Jawa⁴ dengan wilayah yang dipilih adalah Sumatera Utara, sebuah provinsi yang cukup plural dari aspek agama dan suku bangsa. Data penelitian ini berasal dari berbagai dokumen organisasi Muhammadiyah, dan buku-buku hasil penelitian tentang organisasi ini. Pengkajian terhadap dinamika Muhammadiyah di Sumatera Utara memang tidak bisa dilepaskan dari masuk dan berkembangnya Muhammadiyah di Sumatera Timur dan Tapanuli, sebagai dua daerah Keresidenan pada masa kolonial yang kemudian pada masa kemerdekaan (1953) digabung menjadi satu daerah provinsi yang bernama Sumatera Utara. Karena itu, pembahasan berikut akan memperbincangkan Muhammadiyah di Sumatera Timur dan Tapanuli, yang disusul dengan pembahasan Muhammadiyah di Sumatera Utara. Tentu saja pembahasannya diawali dengan kajian tentang sejarah pendirian organisasi ini.

Hasil dan Pembahasan

Pendirian Muhammadiyah

Salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Dahlan yang semasa kecilnya bernama Muhammad Darwis dilahirkan pada tahun 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya adalah K.H. Abubakar bin Haji Sulaiman, seorang khatib pada masjid Sultan Yogyakarta.⁵ Sebagai seorang anak dari keluarga yang taat beragama, tentu saja Dahlan sejak kanak-kanak telah menggeluti pendidikan agama seperti Alquran, hadis, fikih, tafsir, nahu, saraf di berbagai lembaga pendidikan agama di sekitar Yogyakarta. Pendidikan yang demikian menghantarkannya menjadi seorang yang memiliki pengetahuan agama yang kuat. Sementara ilmu pengetahuan lainnya, kecuali ilmu falak, kelihatannya memang tidak digelutinya. Pengetahuan dan pemahamannya dalam bidang agama semakin

dalam ketika Dahlan berkesempatan belajar ke Tanah Suci Makkah selama tiga tahun dalam dua kali kunjungan.⁶

Kunjungan pertama ketika Dahlan menunaikan ibadah haji pada tahun 1890 dan kemudian menetap dan belajar di kota suci ini selama satu tahun. Pada tahun 1903 ia berangkat lagi ke Makkah untuk yang kedua kalinya dan menetap di sana selama dua tahun. Salah seorang gurunya ketika belajar di Makkah ialah Syekh Ahmad Khatib, seorang ulama besar yang berasal dari Minangkabau yang sudah terkenal sebagai seorang yang cukup lantang menentang tarekat Naqsyabandiyah⁷ dan masalah pembagian harta warisan yang berlaku di daerah tanah kelahirannya di Minangkabau. Sebagai seorang murid Ahmad Khatib tentu saja Dahlan pada saat itu telah berkenalan dengan pemikiran pembaharuan yang berkembang di Timur Tengah. Apalagi pada masa itu gagasan pembaharuan Timur Tengah terutama yang dipelopori gerakan Wahabiyah dengan segera menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam, tidak terkecuali Indonesia yang dibawa oleh jamaah haji Indonesia yang kembali dari Hijaz maupun melalui penyebaran jurnal-jurnal pembaharuan semacam *al-'Urwatul Wutsqâ* atau *al-Manâr*.⁸ Pergumulan Dahlan dengan ide-ide pembaharuan baik yang diterimanya langsung dari guru-gurunya maupun melalui bacaannya terhadap berbagai buku menyebabkan Dahlan memiliki keinginan yang kuat untuk menerapkan ide-ide pembaharuan itu di tanah kelahirannya di Yogyakarta.

Hal ini jelas terlihat dari kegelisahan Dahlan menyaksikan keadaan bangsa Indonesia khususnya umat Islam yang terbelenggu dalam berbagai keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan yang sistematis sebagai dampak dari perlakuan penjajahan Belanda; dan didorong pula oleh pengalamannya dalam menyaksikan gelombang pembaharuan yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Hal itulah yang kemudian membuahkannya tekad bagi Dahlan untuk berkontribusi melakukan perubahan ke arah

yang diinginkan, sebagai muara dari keprihatinannya menyaksikan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya.

Jika diperinci, paling tidak keprihatian Dahlan tersebut terfokus pada tiga hal. *Pertama*, keprihatinannya terhadap bentuk kepercayaan dan pengamalan agama masyarakat Jawa yang cenderung sinkretis. Hal ini sebagai muara dari praktik keagamaan yang berlangsung di kalangan masyarakat Jawa khususnya di daerah-daerah bekas kerajaan besar Mataram Jawa, Yogyakarta, tempat kelahiran Dahlan, sebagai salah satu daerah yang sangat kuat dalam tradisi Hindu-Jawa.⁹ Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang membangkitkan semangat keagamaan Dahlan untuk mengadakan pemurnian ajaran dan amalan Islam dari unsur-unsur takhayul, bidah, dan khurafat.

Kedua, keprihatinannya terhadap kondisi dan penyelenggaraan pendidikan agama yang secara metodologik jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan sekolah-sekolah gubernemen. Dalam pengamatan Dahlan bahwa pendidikan umat Islam yang terpusat di pondok-pondok pesantren tidak efisien; selain disebabkan metodologi pengajarannya yang kurang efektif, juga kurang membekali santrinya dalam bidang ilmu pengetahuan umum yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan duniawi. Sedangkan di sekolah-sekolah gubernemen yang secara metodik dan teknik penyelenggaraannya lebih modern, tetapi karena isi bidang studinya tidak bersentuhan dengan iman dan kesalehan sebagai tujuan fundamental pendidikan Islam, menyebabkan sekolah ini pun tidak dapat diharapkan menjadi alternatif bagi pendidikan umat Islam.¹⁰ Dampak yang ditumbuhkannya tidak saja sekadar terjadinya jurang pemisah antara golongan intelegensia yang berlatar belakang pendidikan umum dengan ulama yang berlatar belakang pendidikan pesantren, tetapi lebih dari itu menimbulkan kekurang-pedulian

kalangan intelegensia terhadap persoalan agama, bahkan sebagiannya cenderung memusuhi agama.

Ketiga, keprihatinannya menyaksikan kegiatan para misionaris Kristen yang sudah sangat intens di Jawa Tengah sejak penghujung abad ke-19. Misi-misi tersebut berpengaruh besar dalam program-program pendidikan pemerintah kolonial. Bagi Dahlan, sekalipun tidak disuarakannya secara lantang, tetapi hal ini diterjemahkannya sebagai keinginan pemerintah kolonial untuk mengkristenkan Jawa, dan karena itu dia ingin meningkatkan kualitas beragama masyarakat guna membatasi pengaruh missionaris tersebut.¹¹

Para penulis tentang Muhammadiyah hampir tidak pernah mengabaikan sebuah fakta sejarah bahwa gerakan pembaharuan yang awal sekali dilakukan Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah adalah ketika dia, pada tahun 1898, berusaha mengubah arah kiblat di masjid Kesultanan Yogyakarta yang dinilainya tidak mengarah ke Kakbah. Tindakan Dahlan yang dipandang oleh banyak kalangan bertentangan dengan tradisi agama yang berlangsung secara turun-temurun itu segera mendapat tantangan bukan hanya dari kiai-kiai tua yang konservatif, tetapi juga dari penguasa, meskipun pada lahirnya sultan bersikap netral dalam peristiwa tersebut. Tantangan ini dapat dipandang sebagai salah satu kegagalan Dahlan dalam merealisasikan cita-citanya khususnya di lingkungan istana. Boleh jadi itulah sebabnya mengapa ia lebih banyak melakukan kegiatannya di dalam masyarakat dan di dalam dunia pendidikan daripada di dalam keraton yang kaya dengan tradisi dan berbagai kepercayaan yang sinkretis. Walaupun Dahlan merupakan salah seorang khatib pada masjid di Kesultanan Yogyakarta yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah berpulang ke *rahmatullah* (1896), akan tetapi kehidupan sebagai pedagang batik yang telah digelutinya sejak berusia muda, menyebabkan Dahlan menjadi lebih banyak berada di tengah-tengah masyarakat di luar keraton.

Di luar keratonlah Dahlan berusaha memperbaiki sikap hidup masyarakat dengan mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran sosial dalam agama, seperti gotong royong, menyantuni fakir miskin, anak yatim, dan tolong menolong. Kepada murid-muridnya ia menanamkan sifat tersebut dengan mempraktikkannya secara langsung, sehingga murid-murid dapat melihat dan menghayati nilai-nilai positif yang terkandung dalam agama.

Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Dahlan telah bergabung dengan organisasi Budi Utomo (1909), dengan maksud untuk memperoleh peluang guna menginternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam kelompok kebudayaan ini. Karena Dahlan memang memiliki sikap rasional dan dapat menerima pemikiran modern menyebabkan kehadirannya dalam organisasi ini disambut dengan hangat bahkan cukup berpengaruh, yang menyebabkannya memperoleh posisi sebagai salah seorang komisaris pada cabang Budi Utomo Yogyakarta. Pada tahun 1910 Dahlan bergabung pula ke dalam organisasi Jami'at Khair sebuah organisasi Islam yang didirikan di Jakarta tahun 1905 sebagai tempat berhimpun umat Islam tanpa diskriminasi, sekalipun mayoritas anggotanya adalah orang Arab.¹²

Semangat pembaharuan dan atmosfer intelektual yang dikembangkan organisasi ini, menjadi daya pikat bagi Dahlan untuk bergabung di dalamnya. Melalui Jami'at Khair inilah Dahlan semakin mengenal berbagai jurnal modernis dari Timur Tengah, seperti *al-Manâr*, *al-'Urwah al-Wutsqâ* dan karya-karya modernis lain yang dibawa oleh para guru Arab yang datang mengajar di sekolah-sekolah organisasi tersebut. Bahkan setelah mendirikan Muhammadiyah pun pada tahun 1912, Dahlan masih bergabung dalam organisasi politik, Sarekat Islam, yang diberi kedudukan sebagai penasihat. Dalam berbagai kegiatan inilah, menurut beberapa penulis Dahlan memperoleh pengalaman berharga dalam menata Muhammadiyah menjadi organisasi yang bertalenta modern. Dari Jami'at Khair ditimbanya semangat intelektualisme keagamaan,

dari Sarekat Islam dia berkenalan antusiasisme politik dan dalam Budi Utomo dapat dirasakannya sentuhan revivalisme kebudayaan.¹³

Di tengah kosmopolitalisme pergaulannya sebagai pedagang batik, perjalanannya melaksanakan ibadah haji, belajar kepada berbagai guru di Makkah, pengumpulannya dalam berbagai organisasi dan bacaan-bacaannya, menjadikan Dahlan berpikir keras untuk melakukan perubahan demi kemajuan umat Islam yang sedang mengalami keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Pengumpulan pemikiran itulah yang kemudian mendorongnya “untuk mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 yang berusaha melakukan pencerahan di tengah kemurahan nasib bangsanya. Melalui organisasi yang teraturlah, menurut pendapatnya, sebuah kekuatan baru dapat diorganisir, apalagi situasi pada masa itu berbagai organisasi yang bersifat keagamaan dan politik mulai bermunculan. Usaha Dahlan yang demikian mendapat sokongan dari bekas murid-muridnya dan dari merekalah ia mendapat dukungan bagi organisasinya yang baru itu. Tercatat sembilan orang pimpinan Muhammadiyah pada masa awal itu, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan (Ketua), Abdullah Siradj (Sekretaris), Haji Achmad, Haji Abdurrahman, Haji Sarkawi, Haji Muhammad, Raden Haji Djaelani, Aji Anies, dan Haji Muhammad Pakih.¹⁴

Dipilihnya nama “Muhammadiyah” sebagai nama organisasi yang didirikannya itu, selain secara harfiah mengandung arti “pengikut Muhammad” juga berkaitan erat sikap keagamaan yang diintrodusir Dahlan yang tidak terikat pada mazhab tertentu atau sebagai pengikut ulama tertentu, melainkan semata-mata *ittiba'* kepada Nabi Muhammad saw.¹⁵ Kecuali itu nama Muhammadiyah tersebut terkait pula dengan tujuan Muhammadiyah pertama sekali didirikan yaitu “menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. kepada penduduk bumi putra di dalam residensi Yogyakarta, dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya.”¹⁶

Terlihat jelas bahwa sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, esensi tujuan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan agama Islam sebagaimana diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai *takhayul*, *bid'ah* dan *khurafat*. Di samping itu organisasi ini memunculkan praktik-praktik ibadah yang hampir-hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti salat Hari Raya di tanah lapang, Salat tarawih 11 rakaat, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya. Kegiatan sosial lainnya, sedikit-banyak telah mengadopsi kegiatan zending Kristen, dan berhasil menghambat laju perkembangan zending tersebut pada daerah-daerah tertentu.

Secara agak terperinci kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, yang terasa berbeda pada masa itu dengan praktik-praktik keagamaan yang dilakukan umat Islam pada umumnya, antara lain adalah¹⁷ penentuan arah kiblat yang tepat dalam salat sebagai koreksi dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah barat, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa (*hisâb*), yang nyata-nyata berbeda dengan melakukan *ru'yah* atau pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama, dan menyelenggarakan salat bersama di lapangan terbuka pada hari raya Islam, 'Idul Fitri, dan 'Idul Adha, sebagai ganti dalam salat serupa dalam jumlah jamaah yang lebih kecil yang diselenggarakan di masjid.

Melalui kegiatan-kegiatan di atas, Muhammadiyah dikenal sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan yang modern yang tampil di tengah-tengah masyarakat Islam yang sedang menghadapi krisis. Dengan gaya dan metodenya yang khas, tanpa menimbulkan kecurigaan pemerintah kolonial atau kegoncangan sosial, Muhammadiyah telah mengukuhkan dirinya sebagai organisasi pembaharu. Kedudukan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan sebagaimana

banyak dikemukakan oleh para peneliti dan penulis tentang Muhammadiyah terletak pada upaya-upaya kreatifnya dalam mengubah, memperbaharui dan meluruskan kembali pemikiran, persepsi, kebiasaan-kebiasan dan praktik keberagamaan (Islam) yang telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru.¹⁸

Perkembangan Muhammadiyah

Berkenaan dengan perkembangannya dapat dicatat bahwa dalam masa empat tahun sejak berdirinya Muhammadiyah secara organisatoris hanya berkegiatan di Yogyakarta sekalipun secara individual Dahlan dan pengurus lainnya tetap mengkampanyekan Muhammadiyah ke berbagai daerah. Barulah pada tahun 1917 daerah, operasi Muhammadiyah mulai diperluas. Permintaan untuk mendirikan Muhammadiyah dari berbagai daerah di Jawa semakin banyak ketika Dahlan pada tahun yang sama dalam tablighnya pada Kongres Budi Utomo berhasil mempesona para pendengarnya dengan uraian-uraian yang sistematis tentang agama dan kehidupan sosial. Karena itulah Anggaran Dasar organisasi Muhammadiyah yang pada mulanya membatasi diri di daerah residensi Yogyakarta saja, haruslah terlebih dahulu diubah. Perubahan tersebut pertama sekali dilakukan pada tahun 1920 yang menyebutkan kegiatan Muhammadiyah meliputi seluruh pulau Jawa. Bersamaan dengan itu permintaan untuk mendirikan cabang ternyata tidak saja dari pulau Jawa, melainkan juga datang dari luar Jawa. Karena itu pula tahun 1921, Anggaran Dasar Muhammadiyah kembali diubah yang menyebutkan daerah operasinya di seluruh Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut “memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Nederland; dan memajukan cara kehidupan sepanjang kemauan Agama Islam kepada lid-lidnya (segala sekutunya).”¹⁹

Perluasan organisasi ini ke seluruh Indonesia, selain didukung oleh kepribadian Dahlan dan cara-caranya berpropaganda yang santun, toleran dan komunikatif menjadi daya tarik bagi para pendengarnya untuk segera masuk dalam rangkulan kharismatika Dahlan. Selain itu orang-orang yang telah mengenal pembaharuan Islam di Timur Tengah melihat pula pembaharuan yang agak serupa terdapat dalam Muhammadiyah. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi penyebaran pengaruh organisasi ini apalagi ide-ide tentang pembaharuan, sekalipun belum tentu utuh, memang sudah dikenal di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama perkotaan.²⁰

Perluasan cabang-cabang Muhammadiyah juga diuntungkan oleh keberadaan pedagang-pedagang dari Minangkabau di berbagai kota lainnya. Sebagian para pedagang itu, sedikit-banyak, telah berkenalan dengan pemikiran pembaharuan Islam yang masuk ke Minangkabau. Tidak mengherankan jika Haji Rasul (Haji Abdul Karim Amrullah, ayahanda HAMKA), seorang ulama terkemuka dari Minangkabau dalam perjumpaannya yang hanya sekejap dengan Dahlan di Pekalongan pada tahun 1925 segera bersimpati, dan berjanji akan mengembangkan Muhammadiyah di Minangkabau. Karena itu bukan hal yang luar biasa jika cabang Muhammadiyah yang pertama di luar Jawa adalah di Minangkabau yang berdiri tahun 1925.

Pada tahun 1927 berdiri pula cabang Muhammadiyah di Medan sebagai cabang pertama di Sumatera Utara. Pada tahun itu juga berdiri cabang-cabang Muhammadiyah di Bengkulu, Banjarmasin dan Amuntai. Tahun 1929 cabang Muhammadiyah secara resmi berdiri di Aceh dan Makassar. Tahun 1930 didirikan pula cabang Muhammadiyah Merauke. Sejak tahun 90-an dan seterusnya organisasi mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mencapai hampir semua daerah Indonesia.²¹

Mudah dimengerti jika penyebaran Muhammadiyah di Indonesia sedikit banyak melalui interaksi kaum pedagang. Artinya, Muhammadiyah terbina antara tradisi Kauman Yogyakarta, tempat Muhammadiyah bermarkas, dan tradisi perantau yang menampakkan asal-usul dari *enklave* (kantong) *entrepreneur*. Berkembangnya Muhammadiyah di daerah lain juga berkembang di *enklave entrepreneur*, seperti Pekajangan di Pekalongan, Lawean di Solo, Surabaya, Kotagede di Yogyakarta, dan sebagainya. Seperti masuknya Muhammadiyah ke Minangkabau yang terjadi lewat perkenalan para pedagang Minangkabau yang berada di Pekalongan dengan Dahlan yang kerap melakukan tabligh di daerah itu. Interaksi tersebut sangat berpengaruh di kalangan pedagang, dan akhirnya dibawa sampai ke ranah Minang.

Telah disebutkan di depan bahwa Haji Rasul yang tengah menjenguk keluarganya, A.R. Sutan Mansur, begitu tertarik dengan perbincangan yang disampaikan Kiai Dahlan, tentang “manusia mandiri”. Menurut Dahlan, manusia sebagai makhluk Allah yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada Sang Maha Pencipta, namun memerlukan manusia lain untuk lebih memungkinkan dirinya menjadi manusia yang takwa. Tema itu selalu didengungkan antara lain oleh H.A. Karim Amrullah dalam usahanya menyebarkan Muhammadiyah di Sumatera Barat.²² Sejak itu pula para pedagang batik Sumatera yang bermukim di Pekalongan mendirikan cabang Muhammadiyah dan kemudian berhasil memengaruhi orang sederhana mereka nun jauh di pulau Sumatera. Secara ekstrem bisa digambarkan bahwa jika Kauman-Yogyakarta adalah faktor utama dari kemantapan organisasi, maka tradisi perantau adalah kultur yang selalu menggugah kemantapan dan yang selalu ingin melebarkan sayap.

Bersama dengan perluasan organisasi ke berbagai daerah di Indonesia, Muhammadiyah juga melakukan perluasan dan diversifikasi kegiatan yang dilaksanakannya. Organisasi PKU

(Penolong Kesengsaraan Umum), misalnya, pada mulanya merupakan organisasi yang berdiri sendiri, dan didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah pada tahun 1918 guna memberikan bantuan bagi korban meletusnya gunung Kelud, pada tahun 1921 bergabung dengan Muhammadiyah dan menjadi bagian yang menangani kegiatan seperti pendirian rumah sakit, klinik, maupun penyaluran dana-dana untuk bencana alam.²³

Organisasi wanita dalam Muhammadiyah yang bernama Aisyiah didirikan pada tahun 1922. Organisasi ini memberikan perhatian yang serius terhadap peran ibu dalam pendidikan, terutama karena seorang anak pertama sekali memperoleh pendidikan tentulah dari ibunya sendiri. Hal tersebut bermakna bahwa kaum ibu memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap perkembangan masyarakat melalui asuhan dan pendidikan yang diberikan kepada putera puteri yang dilahirkannya. Dalam perkembangan selanjutnya, sektor kewanitaannya Muhammadiyah ini berkembang dengan dibentuknya organisasi bagi remaja wanita, bernama Nasyyiatul Aisyiyah.²⁴

Satu bagian yang penting dari Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih yang didirikan pada tahun 1927. Majelis ini berfungsi sebagai lembaga pemberi fatwa atau kepastian hukum tentang masalah-masalah yang diperdebatkan umat Islam, baik yang menyangkut agama dalam arti sempit maupun persoalan-persoalan lainnya. Alasan lain bagi pembentukan majelis ini adalah kekhawatiran bahwa pertikaian yang dijumpai dalam masyarakat umumnya mungkin sekali masuk ke dalam organisasi Muhammadiyah sendiri dengan kemungkinan menghambat kemajuan organisasi itu. Dengan demikian, kalau pada masa-masa sebelumnya anggota Muhammadiyah memperoleh ketetapan hukum dari para ulamanya secara perorangan, maka diharapkan melalui Majelis Tarjih ini, akan ada pendapat yang mewakili organisasi dan dipedomani para pemimpin dan anggotanya.²⁵

Penyebaran dan perkembangan Muhammadiyah di Indonesia memang cukup pesat. Dalam tahun 1925 organisasi ini telah memiliki 29 cabang dengan 4.000 anggota. Dalam waktu 13 tahun kemudian yaitu tahun 1938 telah memiliki 852 cabang dengan 250.000. Pada saat itu Muhammadiyah mengelola 1.774 sekolah, 834 masjid, 31 perpustakaan umum dan mempunyai lebih 7.000 *dai*. Muhammadiyah terus berkembang dan berkiprah hingga saat ini. Ini dibuktikan dengan meluasnya sayap organisasi tersebut ke hampir setiap pelosok tanah air, dengan berbagai kegiatan.²⁶

Perlu dijelaskan bahwa jaringan struktural Muhammadiyah di Indonesia terdiri atas: (1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang merupakan jaringan struktural tertinggi dari seluruh level Pimpinan Muhammadiyah. (2) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) setingkat propinsi. (3) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) untuk tingkat kabupaten/kota. (4) Pimpinan Cabang Muhammadiyah pada tingkat kecamatan (*sub-district*). (5) Pimpinan Ranting Muhammadiyah untuk tingkat pemerintahan desa.²⁷ Muhammadiyah juga memiliki sejumlah majelis/badan/lembaga, yang secara fungsional menangani program-program tertentu di lingkungan Muhammadiyah. Setiap level pimpinan Muhammadiyah (baik Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah maupun Pimpinan Cabang) memiliki majelis/badan/lembaga ini. Khusus pada tingkat Pimpinan Cabang, majelis/badan/lembaga ini disebut 'Bagian'.

Adapun majelis/badan/lembaga yang ada di lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis Pembina Kesehatan, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pustaka dan Dokumentasi, Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, Majelis Tabligh, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pembina Ekonomi, Badan Pembinaan

Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Badan Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan, Lembaga Dakwah Khusus, Lembaga Kebudayaan, Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pendidikan Khusus, Lembaga Pengembangan Organisasi, Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan, dan Lembaga Hikmah.²⁸

Selain yang disebutkan di atas, Muhammadiyah juga memiliki organisasi-organisasi otonom yang secara khusus dibentuk dalam bidang-bidang tertentu sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian maksud dan tujuan Muhammadiyah. Jaringan struktural organisasi otonom ini sama dengan struktur pimpinan Muhammadiyah, mulai tingkat pimpinan pusat sampai pimpinan ranting. Organisasi otonom ini terdiri atas Aisyiyah, yang bergerak di kalangan wanita dan ibu-ibu; Pemuda Muhammadiyah, yang bergerak di kalangan pemuda; Nasyi'atul Aisyiyah, yang bergerak di kalangan perempuan-perempuan muda; Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang bergerak di kalangan mahasiswa; Tapak Suci Putera Muhammadiyah, yang bergerak dalam aktivitas bela diri; dan Hizbul Wathan, yang bergerak dalam aktivitas kepanduan.²⁹

Muhammadiyah dari masa ke masa terus tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Sampai tahun 2005, tercatat bahwa Muhammadiyah memiliki 2.461 cabang dengan 6.098 ranting yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Khusus dalam bidang pendidikan Muhammadiyah mengelola 1.128 Sekolah Dasar (SD), 1.179 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP), 509 Sekolah Menengah Umum (SMU), 209 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 1.768 Madrasah Ibtidaiyah/Diniyah (MI/MD), 534 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 171 Madrasah Aliyah (MA), 55 Pondok Pesantren, 32 Universitas, 52 Sekolah Tinggi, 45 Akademi, dan 3 Politeknik. Sedangkan bidang amal usaha lainnya, Muhammadiyah mengelola 312 buah rumah sakit dan poliklinik, 240 Panti Asuhan,

19 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 190 Baitul Tamwil dan 88 Koperasi.³⁰

Semua kegiatan tersebut, besar atau kecil, pada hakikatnya merupakan upaya Muhammadiyah untuk “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa ta’ala,” sebagaimana dinyatakan dalam tujuan organisasi Muhammadiyah.

Perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Timur

Sumatera Utara sekarang ini merupakan gabungan Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli, Keresidenan Sumatera Timur terdiri atas beberapa daerah yang meliputi: Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Simalungun, Asahan, Tanjung Balai, Karo, dan Labuhan Batu sampai ke Bagan Siapi-api. Daerah tersebut merupakan dataran rendah yang subur dan dihuni oleh mayoritas penduduk beragama Islam secara turun temurun sejak masuknya Islam sekitar abad ke-7 di Pantai Barat Sumatera.³¹ Daerah subur itu dipimpin oleh tuan-tuan tanah perkebunan dan raja-raja Melayu yang disebut dengan Sultan. Kekuasaan agama diamanahkan kepada ulama atau guru agama, dan kehidupan beragama diatur dalam satu mazhab tertentu, mazhab Syâfi‘i. Bagi orang-orang yang tidak menganut sesuatu mazhab pastilah dianggap sebagai pembawa paham agama baru yang sering dijuluki sebagai “kaum muda”.³²

Raja-raja di Kesultanan Melayu semuanya beragama Islam; bahkan upacara-upacara keagamaan telah ikut serta dalam melegitimasi kekuasaan dan kewibawaan mereka. Masjid-masjid yang pada umumnya didirikan oleh para Sultan telah ikut berperan dalam mengukuhkan tingkat penghormatan rakyat kepada mereka. Tak heran jika pengagungan dan kultusisme terhadap raja-raja terasa kental dan tak terelakkan, sebagaimana doa-doa khusus

yang dimohonkan para khatib ketika berkhotbah untuk kebahagiaan dan kesentosaan para raja dan keturunannya. Keadaan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan sampai pada masa kemerdekaan Republik Indonesia gambaran keadaan seperti di atas masih saja ditemukan. Kenyataan ini tidak kondusif bagi masuk dan berkembangnya Muhammadiyah ke daerah ini.

Jika kemudian Muhammadiyah masuk dan berkembang ke daerah ini seperti yang dapat disaksikan sekarang ini tentulah bukan berasal dari masyarakat dan orang-orang “pribumi” asli Sumatera Timur, melainkan dibawa oleh para perantau yang telah mengenal Muhammadiyah di kampung asalnya, terutama perantau Minangkabau, Jawa dan Mandailing. Adanya keinginan untuk mendirikan Muhammadiyah di daerah ini sudah dimulai sekitar tahun 1925, ketika Mas Pono yang datang dari Yogyakarta bertemu dengan Djuin St. Penghulu, St. Saidi Djamaris, Dt. Bungsu dan kawan-kawan yang merupakan perantau-perantau dari Minangkabau, yang di kampung halamannya masing-masing telah mengenal dan menerima paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Entah siapa yang memulai, akan tetapi di sela-sela perbincangan mereka sesama pedagang kecil itu, ada keinginan yang sama untuk mendirikan Muhammadiyah. Akan tetapi keinginan untuk mendirikan organisasi setingkat ranting pun masih sulit dilakukan, apalagi paham agama yang diperkenalkan Muhammadiyah banyak berbeda dengan praktik keagamaan di tengah-tengah masyarakat, yang sudah tentu akan banyak mendapat tantangan. Selain itu mereka benar-benar menyadari, bahwa mereka bukanlah ulama, dan tidak pula memahami seluk beluk berorganisasi. Mereka tetaplah sebagai pedagang kecil yang membawa dagangannya berupa barang-barang keperluan sehari-hari ke daerah-daerah perkebunan di sekitar Medan.³³

Sekalipun begitu, kesepakatan lain bisa dicapai yaitu mencari orang-orang yang sepaham. Karena itulah mereka mulai menghimpun

kawan-kawan yang sepaham dengan cara mengenali mereka ketika melaksanakan salat di dekat pajak bundar Medan. Di sinilah awal pertemuan Djuin St Penghulu, Mas Pono, St Maradjo, Kari Suib dan sejumlah kawan-kawannya yang lain dari Tapanuli yang kemudian sepakat untuk mendirikan Muhammadiyah. Selain itu mereka juga melakukan pendekatan terhadap HR. Muhammad Said yang pernah menjadi Ketua atau Vice President Serikat Islam Pematang Siantar dan wartawan *Pewarta Deli* sebagai tenaga baru yang diharapkan dapat memimpin Muhammadiyah jika kelak telah berdiri.³⁴

Keinginan yang telah ada itu semakin kuat ketika AR Sutan Mansur bersama M. Fakhruddin sebagai utusan Hoofdbestuur Muhammadiyah berkunjung ke Medan dan Aceh pada bulan Mei 1927 untuk mempropagandakan Muhammadiyah kepada para sispatisannya. Hal ini tentu saja mempertebal semangat dan hasrat untuk mendirikan Muhammadiyah.³⁵

Bermodalkan keinginan yang kuat untuk berhimpun itulah sebuah pertemuan di Jalan Nagapatan 44 (sekarang Jalan Kediri) Kampung Keling Medan pada tanggal 25 Nopember 1927 dapat dilangsungkan dengan khidmat. Pertemuan itu memang berlangsung alot karena setiap peserta diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang bentuk dan corak organisasi yang akan didirikan itu. Sekalipun begitu, pada akhirnya pertemuan itu berhasil juga membuahkkan kata sepakat untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah di Kota Medan sebagai cabang Muhammadiyah yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Selain itu rapat juga menyepakati Hr. Muhammad Said sebagai ketuanya.

Sekalipun tahun 1927 organisasi Muhammadiyah di Medan telah didirikan, akan tetapi Surat Ketetapan Hoofdbestuur (Pengurus Besar) Muhammadiyah baru dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 1928.³⁶ Tahun ini dinilai sebagai tahun resmi berdirinya Muhammadiyah. Para pengurus Muhammadiyah pada periode awal itu adalah³⁷

HR. Muhammad Said (Ketua), Djuin Sutan Penghulu (Wakil Ketua), Mas Pono (Sekretaris), Penghulu Manan (Wakil Sekretaris), Sutan Saidi (Bendahara), Tujung Muhd Arif (Advisur), dan para komisaris antara lain Kongo St. Maradjo, Hasan St. Batuah, Awan St. Saripado, Hadji Kari Sju'ib, dan St. Ibrahim.

Setelah cabang Medan resmi berdiri di bawah kepemimpinan HR. Muhammad Said, aktivitas dan frekuensi dakwah semakin meningkat. Ceramah-ceramah agama semakin sering dilakukan dalam berbagai pertemuan. Tema-tema pembahasan, sekalipun dalam beberapa aspek memang dikaitkan dengan masalah-masalah kehidupan sosial dan akhlak, akan tetapi fokus perbincangan masih terkonsentrasi pada persoalan *fiqhiyah* sebagai pembicaraan yang sedang hangat pada masa itu, seperti *usolli*, meluruskan arah kiblat, salat memakai dasi, kenduri kematian, ziarah ke kuburan keramat, salat Hari Raya di lapangan terbuka, dan salat sunat 11 rakaat dalam bulan Ramadhan.

Kehadiran Muhammadiyah dengan “paham agama baru” itu, tentu saja menjadi buah bibir masyarakat Medan, baik yang pro maupun yang kontra dalam berbagai diskusi dan perbincangan, baik formal maupun yang bukan. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor yang segera menggelitik perhatian murid-murid senior Madrasah Islamiyah Tapanuli (MIT)³⁸ sehingga mereka membentuk kelompok diskusi (1928) yang bernama *Debating Club*. Di dalam kelompok inilah berbagai hal tentang persoalan-persoalan agama didiskusikan termasuk paham agama yang dikembangkan Muhammadiyah. Bukan berlebihan kalau kemudian Hasan Asari mengurai analisisnya bahwa “Pendirian Debating Club ini berkaitan dengan meluasnya diskusi-diskusi mengenai nasionalisme dan berbagai paham keagamaan yang terutama didorong oleh kaum pembaharu.”³⁹ Terlepas dari materi yang diperdebatkan, akan tetapi pertemuan-pertemuan dalam diskusi

itu dipandang bermanfaat yang kemudian menjadi momentum berdirinya organisasi Al Washliyah pada 30 Nopember 1930.⁴⁰

Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah bukanlah datang dari Al Washliyah sebagai organisasi yang baru saja berdiri di Medan Sumatera Timur, sekalipun paham keagamaan organisasi secara nyata berbeda dengan Muhammadiyah. Memang benar bahwa Al Washliyah secara formal adalah pengikut mazhab Syâfi'i, akan tetapi keterbukaannya menerima perbedaan seperti terlihat nanti pada tahun-tahun berikutnya memungkinkan kerjasama yang sangat akrab antara Al Washliyah dan Muhammadiyah.⁴¹ Tantangan ini juga tidak datang dari organisasi Al-Ittihadiyah yang berdiri di Medan pada tahun 1935, karena dalam berbagai bukti nyata dapat terlihat bahwa sejumlah tokoh Al-Ittihadiyah seperti Zainal Arifin Abbas dan Salim Fachri sekaligus juga simpatisan dan pengasuh madrasah Muallimin Muhammadiyah di Binjai.⁴² Bagi Muhammadiyah sebagaimana dikemukakan Abdul Mu'thi:

Bagi Muhammadiyah adanja Partai dan Organisasi itu dirasakan sebagai teman untuk menambah ketjerdasan bangsa dan kemadjuannya jang pula mendjadi tudjuan Muhammadiyah. Mereka tidaklah dianggap sebagai saingan yang perlu dikalahkan supaja dapat menang sendiri.⁴³

Tantangan yang dirasakan Muhammadiyah pada awal-awal berdirinya terutama datang dari pihak penjajah, sultan dan raja-raja. Dengan politik adu domba pihak kolonial menggunakan para sultan sebagai kekuatan untuk menumpas Muhammadiyah. Tidak mengherankan jika para sultan juga memanfaatkan sebagian ulama untuk menantang Muhammadiyah, sebagaimana dituturkan Abdul Mu'thi sebagai berikut:

Resep *divide et impera* ' pun dikeluarkanlah dari simpanan, maka diadulah para Sulthan, Zelfbestuur dengan Muhammadiyah. Hampir sekalian Sulthan2 menolak dan membentji Muhammadiyah

dan hampir seluruh para ulamanja dikerahkan untuk menentang Muhammadiyah. Diantara ulama itu ada yang memberikan fatwa: 'Barangsiapa yang memasuki Muhammadiyah, maka kafirlah dia'. Fatwa yang tadjam ini, sangat dalam menikam dada Muhammadiyah, karena dengan fatwa yang demikian, rakyat dapat pegangan untuk berjihad menentang Muhammadiyah dan anggota2nja.⁴⁴

Banyak peristiwa tragis yang dilalui Muhammadiyah ketika melaksanakan kegiatannya di Sumatera Timur, mulai dari upaya menghalang-halangi anggota masyarakat yang akan menghadiri rapat-rapat umum Muhammadiyah sampai kepada penganiayaan terhadap pimpinan dan anggota Muhammadiyah.⁴⁵

Halang rintang yang dialami Muhammadiyah itu tidak mengurangi aktivitas para pemimpin Muhammadiyah untuk meluaskan sayapnya ke berbagai daerah di Sumatera Timur, yang ditandai dengan berdirinya grup-grup Muhammadiyah (pada masa itu disebut gerombolan), baik yang setingkat cabang ataupun ranting di berbagai daerah. Hanya dalam masa tiga tahun saja setelah Cabang Muhammadiyah Medan berdiri (1927-1930) telah tumbuh 10 cabang Muhammadiyah lainnya (1) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pancurbatu, 18 Januari 1928; (2) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pematang Tanah Jawa, 27 April 1929; (3) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tebing Tinggi, 1 Mei 1929; (4) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kisaran, 23 Desember 1929; (5) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pematang Siantar, 27 Januari 1930; (6) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kerasaan, 5 Maret 1930; (7) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Glugur, 1 Juli 1930; (8) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Balai, 12 Oktober 1930; (9) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Binjai, 20 November 1930; (10) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Perdagangan, 7 Desember 1930.

Pertumbuhan Cabang Muhammadiyah semakin meningkat, apalagi setelah berlangsungnya Kongres Muhammadiyah ke-30 di Bukittinggi tanggal 14-26 Maret 1930 sebagai kongres pertama yang dilaksanakan di luar Jawa. Salah satu keputusan penting dalam Kongres tersebut adalah bahwa pada setiap keresidenan harus ada wakil HB Muhammadiyah yang dinamakan Konsul Muhammadiyah. Karena itu Hr. Muhammad Said yang sebelumnya merupakan Ketua Cabang Muhammadiyah Medan ditetapkan menjadi Konsul Muhammadiyah Daerah Pesisir Timur. Jabatan ini diemban sampai akhir hayatnya (wafat 22 Desember 1939). Setelah HR. Muhammad Said wafat, Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur dijabat oleh Buya Hamka, dibantu Tami Marihat Usnian, HM Bustami Ibrahim, dan Agus sebagai sekretaris.

Dengan berdirinya Konsul Muhammadiyah, gerakan memperluas sayap semakin gencar dilaksanakan, sementara cabang dan ranting Muhammadiyah aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti mendirikan sekolah, melaksanakan pengajian agama, penyantunan fakir miskin dan yatim piatu serta berbagai kegiatan sosial keagamaan lainnya. Jika pada tahun 1930 jumlah Ranting Muhammadiyah baru sekitar 19 ranting yang bernaung pada 10 cabang, maka pada tahun 1940 ranting Muhammadiyah di seluruh Sumatera Timur berkembang menjadi 72 ranting. Perkembangan dan pertumbuhan yang demikian pesat selain karena gencarnya propaganda yang dilakukan oleh Muhammadiyah juga disebabkan semakin dikenalnya Muhammadiyah di kalangan masyarakat luas. Jika pada masa-masa sebelumnya anggota-anggota Muhammadiyah didominasi oleh para perantau Minang ditambah dengan orang-orang Mandailing dan Jawa, maka pada masa ini kalangan turunan bangsawan dan putera-puteri asli Sumatera Timur pun telah ada yang ikut bergabung di dalamnya, seperti Tengku Katan, Tengku Yahya, Tengku Johani dan lain-lain.⁴⁶ Bahkan beberapa di antaranya

kemudian menjadi tokoh- tokoh yang berpengaruh di kalangan Muhammadiyah.

Pada bulan Juli 1941 ketika berlangsung Konperensi Muhammadiyah di Binjai, H. M. Saleh dari Pematang Siantar berhasil memperoleh dukungan suara terbanyak dan berpeluang menjadi Konsul Muhammadiyah. Akan tetapi karena beliau mengundurkan diri maka Buya Hamka jugalah yang ditetapkan kembali sebagai Ketua Konsul Muhammadiyah Daerah Sumatera Timur. Jabatan ini dipegangnya sampai masa Jepang menyerah kalah pada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, karena pada masa itu Hamka meninggalkan Medan, dan baru kembali ke Medan setelah Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya.

Menjelang kedatangan Jepang ke Indonesia, situasi memang serba tidak menentu apalagi jika dikaitkan dengan persoalan mengenai akan pecahnya perang Pasifik, yang semuanya menyita pikiran para tokoh Muhammadiyah di Indonesia. Apa yang terjadi jika peperangan itu terjadi? Bagaimana kalau hubungan Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur terputus? Siapa yang akan mengambil keputusan tentang Muhammadiyah dan anggota-anggotanya jika hubungan antara Jawa dan daerah-daerah lainnya terganggu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang bergelinding pada forum Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 Mei 1941 di Surabaya, dengan mempertimbangkan berbagai hal. Akhirnya, sidang Tanwir tersebut membuat ketetapan sebagai berikut:

Andaikata pecah peperangan sehingga hubungan antara pusat dan Pimpinan di daerah-daerah terputus, maka Pusat Pimpinan mencerahkan dan mengamankan Muhammadiyah kepada para Consul-consul yang bertindak sebagai Hoofdbestuur, yaitu A.R. Sutan Mansur untuk Sumatera, GM. Hasan Tjorong untuk Borneo, dan H.S. Daeng Muntu untuk Celebes (Sulawesi).⁴⁷

Dengan keluarnya keputusan ini, Muhammadiyah Sumatera Timur banyak melakukan konsultasi dengan AR Sutan Mansur, yang dalam bahasa sehari-hari disebut-sebut sebagai “Imam Muhammadiyah Sumatera”. Tatkala akhirnya Perang Pasifik pecah juga, dan tentera Jepang ke Kota Medan tanggal 12 Maret 1942, peran AR Sutan Mansur sebagai Imam Muhammadiyah di Sumatera menjadi cukup sentral, termasuk di daerah Sumatera Timur.

Tidak seperti yang dikhawatirkan, kedatangan Jepang ke Indonesia menggantikan kolonial Belanda dalam beberapa hal membawa perubahan yang cukup berarti bagi organisasi Muhammadiyah di Sumatera Timur. Pertama, hengkangnya kolonial Belanda, yang berarti lenyapnya kekuasaan Zelfbestuur sebagai badan yang mengawasi berbagai kegiatan agama dan upacara-upacara agama yang berdampak kepada adanya sedikit kebebasan dalam menjalankan kegiatan agama. Kedua, semakin terciptanya hubungan akrab di kalangan para ulama. Jika pada masa-masa sebelumnya terdapat semacam jurang pemisah antara ulama dari kalangan “kaum tua” dengan ulama “kaum muda”, maka pada masa Jepang, kedua golongan ini saling merapat karena anjuran Jepang bagi semua penduduk Indonesia untuk melakukan “sembahyang” menghadap matahari, merupakan ancaman terhadap akidah yang harus dihadapi secara bersama-sama. Ketiga, lumpuhnya kekuasaan para Sultan dan raja-raja yang selama ini selalu digunakan kolonial Belanda untuk memberangus Muhammadiyah. Hal itu berarti bahwa salah satu batu penarung yang selalu menghambat perjalanan Muhammadiyah sudah tidak berperan lagi.

Ketiga hal di atas segera direspons Muhammadiyah untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang selama ini dirasakan sering terhambat, yang salah satu di antaranya adalah hambatan untuk melaksanakan salat Jumat sebagaimana yang dipahami Muhammadiyah. Keinginan seperti itu telah lama ada sejak pada masa permulaan Muhammadiyah berdiri di Medan. Akan

tetapi hambatan selalu datang terutama dari *Zelfbestuur* yang tidak pernah mengizinkan pelaksanaan salat Jumat selain pada masjid-masjid yang telah ditentukan. Pada umumnya masjid-masjid yang melaksanakan salat Jumat adalah masjid-masjid Sultan atau masjid-masjid yang memiliki hubungan kekarabatan dengan kerajaan, yang dalam beberapa bentuk dan praktik penyelenggaraannya jelas berbeda dengan yang dipahami Muhammadiyah. Jadi, masuknya Jepang telah memberi peluang bagi Muhammadiyah di Medan untuk melaksanakan salat Jumat. Hanya sebulan setelah Jepang menginjakkan kakinya di Medan berlangsunglah salat Jumat bagi jamaah Muhammadiyah yang dilaksanakan di gedung Sekolah Muhammadiyah Jalan Kamboja Medan. Bersamaan dengan selesainya masjid Taqwa di Jalan Kamboja dibangun pada awal tahun 1945 sebagai masjid pertama yang dimiliki Muhammadiyah di Kota ini, maka pelaksanaan salat Jumat segera dipindahkan ke masjid tersebut.⁴⁸

Hambatan serupa tidak saja terjadi di Medan, melainkan juga di berbagai daerah di pesisir Sumatera Timur lainnya. Di Sei Rampah, misalnya, sempat terjadi ketegangan antara kerajaan dengan Jahja Pintor, Ketua Cabang Muhammadiyah Rampah, yang sama sekali tidak mengindahkan adanya larangan bagi Muhammadiyah untuk melaksanakan salat dimaksud. Karena larangan itu tidak pernah diindahkan, Jahja Pintor harus meringkuk dalam penjara. Baru menjelang masuknya Jepang, kegiatan tersebut bisa dilaksanakan kembali bersamaan dengan dibebaskannya Jahja Pintor dari penjara.⁴⁹ Dalam masa ini setidaknya ada enam cabang Muhammadiyah yang dipandang sebagai perintis pelaksanaan salat Jumat di lingkungan jamaah Muhammadiyah Sumatera Timur, yaitu Medan, Sei Rampah, Tebing Tinggi, Indrapura dan Negeri Lama.⁵⁰ Pada tahun-tahun berikutnya setiap cabang seakan berlomba untuk melaksanakan salat Jumat di kalangan para jamaahnya, yang kemudian diikuti dengan berdirinya masjid-

masjid Muhammadiyah yang seluruhnya diberi nama Masjid Taqwa.

Memang apabila dilihat segi perkembangan organisasi, tampak jelas bahwa pertumbuhan cabang atau ranting Muhammadiyah tidak lagi sepesat masa-masa sebelumnya. Bahkan sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia hanya ada 9 ranting Muhammadiyah yang bertambah sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 87 ranting. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, selain disebabkan situasi politik pada zaman penjajahan Jepang yang labil dan tidak mudah ditebak sehingga diperlukan kehati-hatian yang tinggi, juga sebagian besar pengurus dan tokoh-tokoh Muhammadiyah pada masa itu lebih terkonsentrasi melakukan konsolidasi organisasi, seperti meningkatkan status ranting menjadi cabang, di samping giat melakukan pembinaan terhadap bagian-bagian organisasi Muhammadiyah seperti Hizbul Wathan, 'Aisyiyah, dan Pemuda Muhammadiyah.

Pada tahun 1945, Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dan memasuki suatu babakan baru yang disebut sebagai zaman Revolusi Nasional. Terlihat jelas bahwa Muhammadiyah membulatkan tekadnya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat tersebut semakin mengental ketika AR. Sutan Mansur, sang "Imam Muhammadiyah Sumatera" dengan lantang menyuarakan: "Hidup dan mati bersama Republik Indonesia", langsung menyulut patriotisme kalangan angkatan muda Muhammadiyah Sumatera Timur untuk terjun langsung membela kemerdekaan. Sejumlah pemuda Muhammadiyah Sumatera Timur, antara lain Bachtiar Junus, Mawardi Noor dan kawan-kawan segera menyusun Lasykar Rakyat yang kemudian berkembang menjadi Hizbullah. Pemuda-pemuda yang tadinya merupakan anggota Pemuda Muhammadiyah dan Hizbul Wathan bersama-sama dengan pemuda Islam lainnya ditempa sebagai lasykar yang siap membela kemerdekaan. Penempatan kader-kader pertama dilakukan di gedung Muhammadiyah Jalan

Kamboja Medan. Peranan pemuda-pemuda Muhammadiyah dalam lasykar tersebut, kelihatannya menempati posisi strategis. Hal ini ditandai dengan ditunjuknya Bachtiar Junus dan Mawardi Noor sebagai panglima Hizbullah di daerah Tanjung Morawa dan sekitarnya.⁵¹

Selain berjuang dalam lasykar Hizbullah, sebagian dari Pemuda Muhammadiyah dan Hizbul Wathan ada pula yang bergabung dalam kesatuan perjuangan Pesindo.⁵² Tercatatlah nama Abdul Malik Munir dari Hizbul Wathan sebagai salah seorang pimpinannya. Di Langkat dan Asahan, para pemuda dan Hizbul Wathan Muhammadiyah banyak pula yang bergabung ke dalam Napindo.⁵³

Pada sisi lain, terutama pada permulaan revolusi, pemerintah memang merencanakan hanya ada satu partai politik di Indonesia yaitu PNI. Dalam hal ini M. Yunan Nasution bersama-sama dengan M. Saleh Umar segera mendirikan PNI di Sumatera Timur. Banyak anggota Muhammadiyah yang bertalenta politik segera bergabung ke dalam organisasi ini. Tetapi seiring dengan perubahan situasi, partai politik yang lain pun boleh juga berdiri, menyebabkan banyak warga Muhammadiyah meninggalkan PNI, dan masuk ke dalam organisasi politik lainnya terutama Masyumi. Apalagi seorang tokoh Muhammadiyah, K.H. Faqih Usman memiliki andil dalam pendirian Masyumi pada tanggal 7 Nopember 1945 dalam Muktamar Umat Islam di Yogyakarta. Hal ini juga menjadi daya pikat tersendiri yang menyebabkan banyak tokoh Muhammadiyah di Sumatera Timur menjadi warga Masyumi. Keterlibatan Muhammadiyah dalam Masyumi semakin menguat ketika Muhammadiyah bersama dengan beberapa organisasi lainnya ditetapkan menjadi salah satu anggota istimewa Masyumi (1945-1959).

Tercurahnyanya perhatian warga Muhammadiyah dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia menyebabkan

kegiatan organisasi banyak yang terabaikan. Sekalipun begitu antara tahun 1945-1950 ada 5 buah ranting yang bertambah di daerah Sumatera Timur. Sampai dengan tahun 1955 Muhammadiyah telah memiliki 112 Ranting, yang mengasuh 3 Taman Kanak-kanak/Bustanul Atfal, 28 Diniyah-Ibtidaiyah, 1 Madrasah Tsanawiyah, 24 Sekolah Dasar, 8 SMP, serta sejumlah Panti Asuhan yang menampung anak miskin dan yatim piatu.

Perkembangan Muhammadiyah di Tapanuli

Telah dikatakan di depan bahwa Tapanuli dan Sumatera Timur merupakan dua daerah administrasi pemerintahan zaman Belanda sampai masa kemerdekaan. Daerah ini berbatasan langsung dengan Sumatera Barat, tempat tumbuh dan berkembangnya Muhammadiyah pertama kali di wilayah Sumatera. Karena itulah berbagai perkembangan yang terjadi di Sumatera Barat, termasuk perkembangan organisasi Muhammadiyah dalam waktu yang tidak terlalu lama, berita mengenai hal itu akan segera sampai ke Keresidenan Tapanuli dengan ibukotanya Sibolga.

Berita tentang suksesnya Kongres Muhammadiyah ke-30 di Bukit Tinggi tanggal 14-26 Maret 1930 sebagai kongres pertama yang dilaksanakan di luar Jawa segera berhembus ke Tapanuli. Hal itu segera menarik perhatian sejumlah tokoh masyarakat di Keresidenan Tapanuli, seperti H.A. Mun'im, Marah Kamin, Gudang Situmpol dan kawan-kawan, yang pada akhirnya bersepakat untuk mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 20 Agustus 1930 di Sibolga.⁵⁴ Pada saat itu juga Muhammad Sultoni menyerahkan sebidang tanahnya di depan Sekolah Gubernemen Sibolga untuk dijadikan sebagai lahan pertapakan sekolah Muhammadiyah.⁵⁵

Sebagaimana pada umumnya di daerah lain, para pelopor Muhammadiyah di daerah ini pun kelihatannya digerakkan oleh para perantau Minangkabau dan orang-orang putera daerah

setempat yang sebagiannya pemah mengecam pendidikan di Sumatera Barat, antara lain Amir Husin Abdul Mun'im, Marah Kamin, Gudang Situmpol, M. Shaleh Thaib, Marahmad Panggabean, M. Thaher Rimin, Adam Sihombing, M. Jamir Panggabean, dan M. Thaib Simamora. Segera setelah Muhammadiyah Sibolga dinyatakan berdiri, maka pada bulan Oktober 1930 dilaksanakan sebuah rapat umum untuk mempropagandakan Muhammadiyah di Padangsidempuan dengan mendatangkan Abdul Malik Siddik dari Bukit Tinggi. Bersamaan dengan itu mulailah dirintis berdirinya Muhammadiyah di Padangsidempuan yang diketuai oleh Kari Jasman Siregar. Pada tahun yang sama juga sebuah Madrasah Diniyah-Ibtidaiah Muhammadiyah di Padangsisimpulan berhasil didirikan, yang pada masa sekarang bernama SD Muhammadiyah I Padangsidempuan. Sejak saat itu Muhammadiyah semakin melebarkan sayapnya ke berbagai daerah yang ditandai dengan berdirinya Muhammadiyah di Sipirok tahun 1931, di Tamiang (Mandailing Julu) tahun 1933 dan daerah-daerah lainnya.⁵⁶

Sesuai dengan keputusan Kongres Muhammadiyah ke 30 tahun 1930 bahwa pada setiap Keresidenan harus ada Konsul Muhammadiyah, keberadaan Muhammadiyah di Sibolga, Padangsidempuan, Sipirok dan Tamiang sampai menjelang akhir tahun 1934 masih bernaung pada Konsul Muhammadiyah Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Baru, setelah dilaksanakannya Musyawarah Muhammadiyah Keresidenan Tapanuli bulan Desember 1930 di Sibolga yang membuahkan ketetapan bahwa di Keresidenan Tapanuli harus ada Konsul yang berdiri sendiri, terpisah dari Sumatera Barat. Sebagai Konsul pertama ditetapkan Muhammad Karim yang menduduki jabatan itu sampai dengan terpilihnya Amir Husin Abdul Mun'in pada Konperensi Daerah tahun 1935.

Musyawarah yang berlangsung pada bulan Desember itu berlangsung meriah yang dihadiri oleh tokoh dan para simpatisan

Muhammadiyah di Tapanuli. Apalagi pertemuan tersebut sekaligus merupakan rapat umum yang mendatangkan tokoh-tokoh penting Muhammadiyah dari Sumatera Barat seperti AR Sutan Mansyur, Hamka dan Dr. H. Abdul Karim Amrullah. Hal inilah yang menyebabkan Muhammadiyah semakin dikenal oleh masyarakat luas. Untuk selanjutnya Muhammadiyah pun berkembang ke Barus, Sibabangun, Sorkam, Aek Botik dan Sibulan-bulan. Demikian juga ke daerah Sigalangan, Sibuhuan, Sayur Matinggi, Siroatorkis, Hutatonga, bahkan juga ke daerah pesisir barat Tapanuli seperti Batahan dan Natal.

Pada tahun 1947, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dipindahkan dari Sibolga ke Padangsidempuan, karena perkembangan Muhammadiyah di Padangsidempuan jauh lebih pesat dibandingkan dengan di Sibolga. Pada saat itu jumlah cabang Muhammadiyah di Tapanuli Selatan sudah berdiri 12 cabang.

Demikianlah dari tahun ke tahun gerakan Muhammadiyah semakin dirasakan oleh masyarakat, apalagi pada beberapa daerah sekolah-sekolah Muhammadiyah telah memberikan sumbangan berarti bagi perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti misalnya Pesantren K.H. Ahmad Dahlan Sipirok (1962), Kulliyatul Muballighin di Ladang Tengah (1963), dan Rumah Anak Yatim di Barus (1963).

Pada tahun 1966, sesuai dengan hasil instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 5 tahun 1966 bahwa pada setiap daerah tingkat II yang memiliki sedikitnya 5 cabang dapat mendirikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Sejak saat itu Muhammadiyah di daerah ini menjadi tiga daerah, yaitu Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah berkedudukan di Sibolga; Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berkedudukan di Padangsidempuan; dan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kabupaten Nias berkedudukan di Gunung Sitoli.

Perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Utara

Pada tahun 1953, struktur pemerintahan Republik Indonesia membentuk Propinsi Sumatera Utara, yang terdiri atas daerah Tapanuli, Sumatera Timur dan Aceh. Muhammadiyah dalam hal ini berusaha untuk menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan yang baru itu, dengan menetapkan H. Bustami Ibrahim sebagai Koordinator Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara. Sedangkan Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur diamanahkan kepada Bachtiar Junus yang dijabatnya sampai tahun 1955.

Perubahan dan penataan organisasi terus berlangsung sampai tahun 1959, akan tetapi berbagai kegiatan memang tidak dapat berjalan lancar terutama karena adanya pergolakan politik yang dikenal dengan peristiwa Nainggolan. Sekalipun begitu, amal usaha Muhammadiyah secara perlahan tetap menunjukkan grafik yang naik. Dapat dicatat bahwa pada tahun 1957, Muhammadiyah melalui inisiatif beberapa orang pemuda mendirikan sebuah Akademi Falsafah dan Hukum Islam. Pendirian ini dipimpin langsung oleh antara lain H.M. Bustami Ibrahim, D. Dyar Karim, dan Abdul Mu'thi. Akademi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam bidang pelayanan kesehatan sebagai salah satu program dari bagian PKU (Penolong Kesengsaraan Umum), didirikan pula Balai Pengobatan Umum yang terletak di Jalan Tamrin Medan di bawah pengawasan Dr. H. Mohammad Darwis. Kecuali itu, Aisyiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah mendirikan pula PGAP dan PGAA serta beberapa taman Kanak-kanak Bustanul Atfal.⁵⁷

Sampai akhir tahun 1959 Muhammadiyah Sumatera Utara telah memiliki 48 Sekolah Dasar, 42 Diniyah/Ibtidaiyah, 3 Madrasah Tsanawiyah, 14 SMP, 3 SMEP, 1 Sekolah Teknik Pertama. Selain itu Aisyiyah juga mengash 11 TK-Bustanul Atfal, dan 2 PGA Putri untuk tingkat PGAP dan PGAA.

Seiring dengan situasi yang terus berubah, Muktamar Muhammadiyah ke-36 tahun 1965 di Bandung kembali mengubah struktur organisasi Muhammadiyah dengan memedomani struktur daerah administrasi pemerintah Republik Indonesia. Sususannya adalah sebagai berikut. Cabang merupakan satuan anggota yang terbagi atas ranting-ranting. Daerah ialah satuan cabang dalam daerah tingkat II (Kabupaten/Kodya). Sedangkan Wilayah yaitu satuan daerah dalam pemerintah daerah tingkat I.

Berdasarkan ketetapan ini Muhammadiyah terpaksa melikuidasi istilah konsul Muhammadiyah Wilayah (PWM) untuk daerah tingkat I dan Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) untuk tingkat II. Sekalipun begitu untuk masa cukup lama, Muhammadiyah di Sumatera Utara belum melakukan penyesuaian secara utuh. Barulah melalui Musyawarah Wilayah I yang berlangsung pada tanggal 21-23 April 1967 disepakati struktur organisasi tingkat propinsi atau wilayah dengan sebutan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) Sumatera Utara. Terpilih sebagai ketua PMW untuk pertama kali adalah Nasziruddin Daud Pane yang akrab dengan panggilan N.D Pane.

Dengan kewibawaan yang tidak dibuat-buat, N.D Pane memang merupakan figur pimpinan yang disegani dan dihormati. Tidak heran jika enam kali Musyawarah Wilayah dalam rangka 30 tahun (1960-1990), N.D. Pane alumni Mustafawiyah yang kemudian intens berkenalan dengan Muhammadiyah ketika belajar di Sumatera Barat ini tetap terpilih menjadi ketua PMW Sumatera Utara.

Dalam masa-masa awal kepemimpinannya, Muhammadiyah Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya dengan memberikan stimuli dan motivasi guna meningkatkan aktivitas amal usaha Muhammadiyah pada 90 cabang yang tersebar pada 12 Daerah yang berada dalam naungannya, yaitu Medan, Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Tebing Tinggi, Asahan-Tanjung Balai, Simalungun-

Pematang Siantar, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu, dan Nias.

Banyak kemajuan yang dicapai oleh Muhammadiyah masa kepemimpinan N.D. Pane. Pada masa kepemimpinannya lah Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan didirikan (1987). Demikian juga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Kisaran-Asahan, serta Sekolah Tinggi Islam Tapanuli Tengah. Pada masa ini juga dijumpai perkembangan Pondok Pesantren seperti pondok pesantren K.H. Ahmad Dahlan Sipirok yang berdiri tahun 1962, bagaikan disulam menjadi pondok pesantren modern yang cukup diperhitungkan di Sumatera Utara, begitu juga Pesantren Kuala Madu Binjai dan Pesantren Darul Arqam di Kerasan-Simalungun. Secara agak terperinci keadaan amal usaha Muhammadiyah pada akhir tahun 1990 adalah 63 unit TK-Bustanul Atfal, 109 unit Sekolah Dasar (SD, MI/MD), 64 unit SLTP (SMP, MTs), 36 unit SLTA (SMU, SMK, MA), 3 unit Pondok Pesantren, 12 unit Pelayanan Kesehatan, dan 5 unit Panti Asuhan.

Jumlah di atas pada masa selanjutnya terus bertambah dan berdasarkan laporan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara untuk tahun 2005 bahwa jumlah amal usaha dan Rumah Ibadah Muhammadiyah ditemukan data bahwa Muhammadiyah memiliki 81 unit TK-Bustanul Atfal, 220 unit Sekolah Dasar (SD, MI/MD), 75 unit SLTP (SMP, MTs), 41 unit SLTA (SMU, SMK, MA), 3 unit Pondok Pesantren, 1 unit Sekolah Luar Biasa, 5 unit Perguruan Tinggi (Univ/ST), 18 unit Amal Usaha Bidang Kesehatan, 7 unit Amal Usaha Bidang Sosial, 1 unit Amal Usaha Bidang Ekonomi, 257 masjid, dan 137 musala.

Amal Usha yang dikemukakan di atas tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara, yang terdiri atas 19 daerah Kabupaten/ Kota, sebagaimana terjadinya persebaran lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah seperti di Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang,

Tebing Tinggi, Karo, Dairi, Pematang Siantar, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Asahan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias, Simalungun, Tanjung Balai, Madina, dan Serdang Bedagai.

Penutup

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Muhammadiyah telah bertapak di Sumatera Utara sejak tahun 1927 di Medan, dan kian gemilang dalam mendirikan cabang-cabang di luar Medan. Para perintis Muhammadiyah di kawasan ini adalah para perantau yang telah mengenal Muhammadiyah di kampung asalnya, terutama perantau Minangkabau, Jawa dan Mandailing.

Kedua, dalam usaha mengembangkan pengaruh organisasi, Muhammadiyah mendapatkan tantangan malah bukan dari Al Washliyah maupun Al Ittihadiyah yang merupakan organisasi asal Sumatera Timur, melainkan dari pihak-pihak penjajah, sultan, dan raja-raja. Para sultan dan raja setempat dijadikan pihak kolonial sebagai kekuatan untuk menumpas paham dan gerakan Muhammadiyah. Mereka bahkan memanfaatkan sebagian ulama dari kaum tua untuk menantang paham dan gerakan Muhammadiyah.

Ketiga, kendati mendapatkan tantangan dari banyak pihak, Muhammadiyah dari awal sampai saat ini berhasil relatif menancapkan pengaruh organisasi di Sumatera Utara yang diperkuat oleh muncul dan berkembangnya sejumlah amal usahanya terutama dalam bidang pendidikan, sehingga organisasi ini relatif berhasil menyaingi Al Washliyah dan Al Ittihadiyah sebagai organisasi yang didirikan oleh orang-orang yang berasal dari Sumatera Utara. Lembaga pendidikan milik Muhammadiyah lebih banyak dari milik Al Washliyah ataupun Al Ittihadiyah.

Pustaka Acuan

- Abdullah, Taufik. *School and Politics: the Kaum Muda Movement in West Sumatera 1927-1933*. New York: Cornell University, 1967.
- Alfian. *Muhammadiyah: the Political Behavior of Muslim a Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989.
- Al-Merbawi, Abdul Manam Bin Mohamad, *et al.* "Tarekat Naqshabandiyah Khalidiyyah in Malaysia: A Study on the Leadership of Haji Ishaq bin Muhammad Arif," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 2, 2012.
- Asari, Hasan. *Modernisme Islam: Tokoh, Gagasan dan Gerakan*. Bandung: Citapustaka Media, 2002.
- Azhari, Susiknan. "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat," dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol. 44, No. 2, 2006.
- Azra, Azyumardi. "Mengkaji Ulang Modernisme Muhammadiyah" dalam *Kompas*, Jumat, 9 Nopember 1990.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. "Lazismu and Remaking the Muhammadiyah's New Way of Philanthropy," dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol 53, No 2 (2015).
- Biyanto. "Muhammadiyah dan Problema Hubungan Agama-Budaya," dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 5 No 1 (2010).
- Darmadi, Dadi. "Tears and Cheers in Jombang: Some Notes on the 33rd Nahdlatul Ulama Congress," dalam *Studia Islamika*, Vol. 24, No. 1, 2017.
- Erawadi. "Pusat-Pusat Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah di Tapanuli Bagian Selatan," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 38, No. 1, 2014.
- Hasanuddin, Chalidjah. *Al Jam'iyatul Washliyah: Api dalam Sekam*. Bandung: Pustaka, 1988.

JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAM AND MUSLIM SOCIETIES

- Hilmy, Masdar. "Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 2, 2012.
- Ja'far, dan Ahmad Mushlih (ed.). *Potret HIMMAH: Menyibak Sejarah, Gerakan, dan Identitas*. Banda Aceh: PeNA, 2007.
- Ja'far. "Peran Al Jam'iyatul Washliyah dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi'i di Era Kontemporer," dalam *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 1-29.
- Ja'far. "Respons Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global," dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- Jamhari. "Muhammadiyah's 2000 Congress: Preparing for the New Millenium," dalam *Studia Islamika*, Vol 7, No 3 (2000).
- Moehammadijah, HB. *Moehammadijah Hindia Timur 1927-1932*. Jogjakarta: HB Moehammadijah, 1933.
- Mu'thi, Abdul. "30 Tahun Muhammadiyah di Daerah Sumatera Timur" dalam *30 Tahun Muhammadiyah di daerah Sumatera Timur*. Medan: Panitia Besar Perihgatan, Pusat Pasar 1984.
- Nasution, Tanwir Ahmad. "Sejarah Berdirinya Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tapanuli Selatan." Makalah tidak dipublikasikan, 2005.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam 1900-1942*. Jakarta LP3ES, 1980.
- Remantan, M. Daud. "Gerakan Pembaruan Islam di Aceh (1914-1953)." Disertasi: IAIN Syarif Hidayatullah, 1986.
- Saragih, Aliman. "Kontribusi Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Kemerdekaan Indonesia (1930-1950)," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 1, 2016.
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respon Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.

- Siddik, Dja'far, dan Ja'far, *Al-Ittihadiyah: Delapan Dasawarsa Menerangi Nusantara*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Siddik, Dja'far. "Konsep Pendidikan Islam Muhammadiyah: Sistematisasi dan Interpretasi Berdasarkan Perspektif Ilmu Pendidikan." Disertasi: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Siregar, L. Hidayat. "Sejarah Tarekat dan Dinamika Sosial," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 2, 2019.
- Siregar, L. Hidayat. "Tarekat Naqsyabandiyah Syaikh Abdul Wahab Rokan: Sejarah, Ajaran, Amalan, dan Dinamika Perubahan," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 35, No. 1, 2011.
- Suharto, Toto. "Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia," dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 9 No 1 (2014).
- Suprayitno. "Islamisasi di Sumatera Utara: Studi tentang Batu Nisan di Kota Rantang dan Barus," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 1, 2012.
- Witjosukarto, Amir Hamzah. *Pembaharuan Pendidikan & Pengajaran Islam oleh Pergerakan Muhammadiyah*. Malang: Ken Mutia, 1966.
- Yusuf, Maulana, *et al.*, "Islamic Ethics in The Field of Politics: Response and Critical Review of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah of Jambi Province Against the Implementation of Direct Elections (2005-2015)," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 41, No. 1, 2017.

Catatan Akhir:

¹Lihat kajian tentang NU dalam Dadi Darmadi, "Tears and Cheers in Jombang: Some Notes on the 33rd Nahdlatul Ulama Congress," dalam *Studia Islamika*, Vol. 24, No. 1, 2017; Susiknan Azhari, "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat," dalam *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol. 44, No. 2, 2006; Toto Suharto, "Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia," dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 9 No 1 (2014).

²Lihat kajian tentang Muhammadiyah dalam Jamhari, "Muhammadiyah's 2000 Congress: Preparing for the New Millenium," dalam *Studia Islamika*, Vol 7, No 3 (2000); Zakiyuddin Baidhawiy, "Lazizmu and Remaking the Muhammadiyah's New Way of Philanthropy," dalam *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol 53, No 2 (2015); Biyanto, "Muhammadiyah dan Problema Hubungan Agama-Budaya," dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 5 No 1 (2010); Masdar Hilmy, "Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 2, 2012.

³Aliman Saragih, "Kontribusi Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Kemerdekaan Indonesia (1930-1950)," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 40, No. 1, 2016; Ja'far, "Respons Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global," dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, 2016; Ja'far, "Peran Al Jam'iyatul Washliyah dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi'i di Era Kontemporer," dalam *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 1-29; Dja'far Siddik dan Ja'far, *Al-Ittihadiyah: Delapan Dasawarsa Menerangi Nusantara* (Medan: Perdana Publishing, 2017).

⁴Kajian yang pernah dilakukan misalnya karya Maulana Yusuf, *et al.*, "Islamic Ethics in The Field of Politics: Response and Critical Review of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah of Jambi Province Against the Implementation of Direct Elections (2005-2015)," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 41, No. 1, 2017.

⁵Amir Hamzah Witjosukarto, *Pembaharuan Pendidikan & Pengajaran Islam oleh Pergerakan Muhammadiyah* (Malang: Ken Mutia, 1966), h. 8.

⁶Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), h. 85.

⁷Tentang tarekat ini di Indonesia, lihat karya L. Hidayat Siregar, "Sejarah Tarekat dan Dinamika Sosial," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 33, No. 2, 2019; L. Hidayat Siregar, "Tarekat Naqsyabandiyah Syaikh Abdul Wahab Rokan: Sejarah, Ajaran, Amalan, dan Dinamika Perubahan," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 35, No. 1, 2011; Erawadi, "Pusat-Pusat Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah di Tapanuli Bagian Selatan," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 38, No. 1, 2014; Abdul Manam Bin Mohamad al-Merbawi, *et al.*, "Tarekat Naqshabandiyah Khalidiyah in Malaysia: A Study on the Leadership of Haji Ishaq bin Muhammad Arif," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 2, 2012.

⁸Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), h. 112.

⁹*Ibid.*

¹⁰Dja'far Siddik, "Konsep Pendidikan Islam Muhammadiyah: Sistematisasi dan Interpretasi Berdasarkan Perspektif Ilmu Pendidikan" (Disertasi: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, h. 139.

¹¹Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of Muslim a Modernist Organization under Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989), h. 161.

¹²Noer, *Gerakan*, h. 86.

¹³Shihab, *Mcmbendung*, h. 113.

¹⁴Alfian, *Muhammadiyah*, h. 161.

¹⁵M. Margono Puspo Suwamo, *Gerakan Islam Muhammadiyah* (Yogyakarta: Persatuan, 1986), h. 27.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Profil Muhammadiyah*, h. 4-5.

¹⁷Azyumardi Azra, "Mengkaji Ulang Modernisme Muhammadiyah," dalam *Kompas*, Jum'at, 9 Nopember 1990.

¹⁸Suwamo, *Gerakan*, h. 27. Dalam perkembangan selanjutnya, tujuan organisasi Muhammadiyah memang mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut lebih bersifat redaksional sesuai dengan perkembangan organisasi dan perkembangan negara Republik Indonesia.

¹⁹Lihat Noer, *Gerakan*, h. 88-90.

²⁰*Profil Muhammadiyah*, h. 7

²¹*Profil Muhammadiyah*, h. 8; Noer, *Gerakan*, h. 88.

²²Noer, *Gerakan*, h. 89.

²¹*Ibid.*

²³*Ibid.*, h. 93.

²⁴*Ibid.*, h. 94-95.

²⁵*Profil Muhammadiyah*, h. 104.

²⁶*Ibid.*, h. 107.

²⁷*Ibid.*, h.108.

²⁸*Ibid.*, h. 424.

²⁹Lihat kajian mengenai masalah ini dalam Suprayitno, "Islamisasi di Sumatera Utara: Studi tentang Batu Nisan di Kota Rantang dan Barus," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 36, No. 1, 2012.

³⁰Julukan kaum muda (*kaum mudo*) merupakan istilah yang populer di Minangkabau pada awal abad ke-20 sebagai julukan yang ditujukan kepada pembaharu seperti Ahmad Khotib dan pengikut-pengikutnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang yang tidak terikat mazhab tertentu. Sebaliknya orang-orang yang bermazhab disebut kaum tua (*kaum tuo*). Lihat Taufik Abdullah, *School and Politics, the Kaum Muda Movement in West Sumatera 1927-1933* (New York: Cornell University, 1967), h. 45.

JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAM AND MUSLIM SOCIETIES

³¹Abdul Mu'thi, "30 Tahun Muhammadiyah di Daerah Sumatera Timur," dalam *30 Tahun Muhammadiyah di daerah Sumatera Timur* (Medan: Panitia Besar Peringatan, Pusat Pasar 184, 1957), h. 99.

³²Lihat M. Nur Haitamy, "Muhammadiyah Daerah Sumatera Timur," dalam *30 tahun Muhammadiyah*, h. 177.

³³HB Moehammadijah, *Moehammadijah Hindia Timur 1927-1932* (Jogjakarta: HB Moehammadijah, 1933), h. 4.

³⁴Pada tanggal yang sama Cabang Banda Aceh juga didirikan. Lihat M. Daud Remantan, "Gerakan Pembaruan Islam di Aceh (1914-1953)" (Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1986), h. 98.

³⁵Mu'thi, "30 Tahun", h. 100

³⁶Lihat ulasan MIT sebagai lembaga pendidikan dalam artikel karya Ja'far dalam Ja'far dan Ahmad Mushlih (ed.), *Potret HIMMAH: Menyibak Sejarah, Gerakan, dan Identitas* (Banda Aceh: PeNA, 2007).

³⁷Hasan Asari, *Modernisme Islam: Tokoh, Gagasan dan Gerakan* (Bandung: Citapustaka Media, 2002), h. 235.

³⁸Chalidjah Hasanuddin, *Al Jam'iyatul Washliyah: Api dalam Sekam* (Bandung: Pustaka, 1988), h. 11.

³⁹Asari, *Modernisme*, h. 248

⁴⁰Haitamy, "Muhammadiyah", h. 182.

⁴¹*Ibid.*, h. 121.

⁴²Mu'thi, "30 tahun", h. 105.

⁴³*Ibid.*, h. 105-106.

⁴⁴*Ibid.*, h. 119.

⁴⁵*Ibid.*, h. 133.

⁴⁶*Ibid.*, h. 135.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, h. 141.

⁵⁰*Ibid.*, h. 141

⁵¹*Ibid.*

⁵²Tanwir Ahmad Nasution, "Sejarah Berdirinya Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tapanuli Selatan" (Makalah, tidak dipublikasikan, 2005), h. 1.

⁵³*Ibid.*, h. 2.

⁵⁴*Ibid.*, h. 3-4.

⁵⁵Data diolah dari berbagai sumber dan lihat juga Haitamy, "Muhammadiyah Daerah Sumatera Timur," h. 171-218.